

ABSTRAK

JUDUL TESIS: ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KETENTUAN HUKUM *ANTIDUMPING* DI INDONESIA DALAM KERANGKA HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

NAMA MAHASISWA: RACHMAT DARMAWAN

NIM: 207161019

KATA KUNCI: *ANTIDUMPING*, TINDAKAN PEMULIHAN (*TRADE REMEDIES*).

Indonesia sebagai negara yang turut ambil bagian dalam perdagangan multilateral, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the world Trade Organization* (WTO) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 3564. Dengan meratifikasi *Agreement Establishing WTO* berarti Indonesia serta merta juga telah meratifikasi *Antidumping Code* (1994) yang merupakan salah satu dari *Multilateral Trade Agreement*. Sebagai tindak lanjut diratifikasinya *Agreement Establishing the WTO*, Indonesia menyisipkan ketentuan dasar tentang Antidumping dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang tercantum dalam Bab IV tentang Bea Masuk *Antidumping* dan Bea Masuk Imbalan, Keberadaan Peraturan *Antidumping* sebagai *trade remedies* harus dianggap sebagai kebutuhan yang tidak boleh terpisahkan dalam praktek perdagangan internasional dalam fungsinya menjaga terciptanya perdagangan yang adil (*fair trade*), dan untuk itu keberadaan Peraturan *Antidumping* dalam perdagangan internasional mutlak diperlukan. Hukum *Antidumping* yang berlaku di Indonesia, Jika dikaji berdasarkan aspek yuridis, maka sebagai sistem hukum dapat dikaji secara mendalam menurut struktur hukum, substansi hukum, budaya dari hukum *Antidumping*.

ABSTRACT

THESIS TITLE: ANALYSIS OF JURIDIS IMPLEMENTATION OF LEGAL PROVISIONS IN INDONESIA IN THE INTERNATIONAL TRADE LEGAL FRAMEWORK.

STUDENT NAME: RACHMAT DARMAWAN

NIM: 207161019

KEY WORDS: ANTIDUMPING LAW, TRADE REMEDIES.

Indonesia as a country taking part in multilateral trading, Indonesia has ratified the Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) with Law No. 7 of 1994 as published in the State Gazette Number 3564. By ratifying the Agreement Establishing WTO means Indonesia has also been ratified the Antidumping Code (1994) which is one of the Multilateral Trade Agreements. As a follow up to the ratification of the Agreement Establishing the WTO, Indonesia inserted the basic provisions on Antidumping in Law Number 10 of 1995 on Customs, set forth in Chapter IV on antidumping duties and import duties, The existence of anti-dumping regulations as trade remedies should be considered as an indispensable necessity in international trade practices in its function of maintaining fair trade, and therefore the existence of anti-dumping regulations in international trade is absolutely necessary. Antidumping Law applicable in Indonesia, If examined based on juridical aspects, then as a legal system can be studied in depth according to the legal structure, legal substance, culture of anti-dumping law.